

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah hak yang fundamental atau asasi dalam kehidupan manusia. Pendidikan yang universal, merupakan suatu keharusan bagi manusia, karena disamping pendidikan sebagai upaya memanusiakan manusia itu sendiri. Dengan perkembangan kebudayaan manusia, timbulah tuntutan akan adanya pendidikan yang terselenggara lebih baik, lebih teratur dan didasarkan atas pemikiran yang matang. Manusia ingin agar berhasil dalam melaksanakan hidupnya, dalam pertemuan dan pergaulannya dengan sesama dan dunia serta dalam hubungannya dengan Tuhan.

Pendidikan merupakan pemotong mata rantai kemiskinan. Melalui pendidikan yang mencukupi, seseorang dapat hidup dengan layak seperti yang diharapkan. Pendidikan pada hekekatnya merupakan suatu upaya mewariskan nilai yang akan menjadi penolong dan penentu umat manusia dalam menjalani kehidupannya dan sekaligus untuk perbaikan nasib dan peradaban umat manusia. Tentunya harapan manusia di masa yang akan datang yaitu keadaan di mana kehidupan seseorang lebih baik dari keadaan sekarang.

Penyelenggaraan pendidikan dimaksudkan untuk memberikan pencerahan dan sekaligus perubahan pola hidup kepada peserta didik. Mohammad Saroni dalam bukunya menyatakan bahwa pencerahan diperlukan sebagai suatu usaha sadar untuk menjadikan kita sebagai sosok penting dalam kehidupan dan perubahan yang dimaksud adalah untuk mempersiapkan kita sebagai sosok yang mampu menghadapi setiap perubahan dalam kehidupan. (Manajemen Sekolah: Kiat Menjadi Pendidik Yang Kompeten

Menurut undang-undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa:

“ pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara”.

Berdasarkan UU Sisdiknas tersebut diharapkan pendidikan menjadi landasan kuat yang diperlukan untuk meraih kemajuan bangsa di masa depan. Dengan demikian, pendidikan menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi karena ia merupakan factor penentu suatu bangsa untuk bisa memenangkan kompetisi global. Semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Namun belum semua warga Negara Indonesia mampu mengakses pendidikan sehingga tujuan pemerintah dalam penyelenggaraan wajib belajar belum sepenuhnya tercapainya. Faktor yang kurang mendukung pendidikan salah satunya adalah masalah kemiskinan yang menjauhkan masyarakat dalam menjangkau pendidikan. Masalah pembiayaan pendidikan selalu menjadi masalah krusial bagi masyarakat, terutama pada lapisan masyarakat menengah ke bawah. Mereka adalah masyarakat yang sering menjadi korban dari biaya pendidikan yang terus melangit. Mereka tidak mampu mengikuti proses pendidikan dan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansialnya. Hal ini tentu saja menjadikan mereka sebagai kelompok masyarakat yang dikecewakan oleh kondisi.

Peraturan pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2005 tentang kewenangan provinsi sebagai daerah otonom khususnya pasal 3 yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan di daerah khususnya pasal 3 a menyebutkan bahwa “ penetapan kebijakan tentang penerimaan siswa dan mahasiswa dari masyarakat minoritas, terbelakang dan atau tidak mampu menjadi tanggung jawab daerah pemerintah daerah memahami situasi wilayahnya untuk menentukan

kebijakkan pendidikan terutama pemerataan pendidikan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan undang - undang serta peraturan pemerintah tersebut, maka semua warga negara Indonesia berhak mendapat pengajaran tanpa terkecuali.

Instruksi Presiden No 7 tahun 2014 diantaranya mengamatkan tentang Program Indonesia Pintar (PIP) kepada kementrian pendidikan dan kebudayaan untuk menyiapkan kartu Indonesia Pintar dan menyalurkan dana Program Indonesia Pintar kepada siswa yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Dalam intruksi presiden Nomor 7 Tahun 2014 diantaranya mengamatkan tentang Program Indonesia Pintar (PIP) kepada kementrian pendidikan dan kebudayaan untuk menyiapkan kartu

Indonesia Pintar dan menyalurkan dana Program Indonesia Pintar kepada siswa yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Tujuan dari program Indonesia pintar tersebut adalah untuk mambantu siswa miskin memperoleh pendidikan yang layak, mencegah anak putus sekolah, serta untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Bantuan ini diharapkan untuk siswa dalam memenuhi kebutuhan sekolah seperti: biaya transportasi siswa pergi ke sekolah, biaya perlengkapan sekolah, dan uang suku, adanya program indonesia pintar diharapkan tidak ada lagi siswa yang putus sekolah dengan alasan kurangnya biaya.

Dana bantuan ini merupakan bantuan tunai kepada seluruh anak usia sekolah yang berasal dari keluarga mampu melalui Kementrian pendidikan dan Kebudayaan dan Kementrian Agama. Program Indonesia pintar ini merupakan penyempurnaan Program Bantuan siswa, yang telah bergulir sejak tahun 2008. Fenomena yang terjadi salah satunya adalah masih terdapat anak yang tidak bersekolah dan masih terdapat siswa yang berasal dari keluarga mampu terdaftar sebagai penerima dana PIP serta masih adanya siswa yang tergolong tidak mampu tidak terdaftar sebagai penerima dana PIP. padahal seharusnya

pemerintah meluncurkan program ini adalah diperuntukan bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu atau miskin agar mendapat kesempatan pendidikan yang sama.

Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Alor, masalah pendidikan cukup beragam. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain, faktor ekonomi, sarana dan prasarana, dan kesadaran individu serta letak geografis. Salah satu contohnya yakni , Desa Probur di Kabupaten Alor yang berjarak sekitar 43 km dari pusat kota Kabupaten Alor. Kondisi pendidikan di daerah pegunungan cenderung tertinggal dibandingkan dengan kondisi pendidikan dipusat kota Alor karena kurangnya pemeratan pembangunan di kabupaten Alor. Dilihat dari segi ekonomi, kebanyakan masyarakat di Desa Probur memiliki tingkat ekonomi rendah tidak dapat menikmati proses belajar mengajar yang kondusif.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Bpk. Watinaha I. Maraben selaku kepala desa Probur, bahwa Jumlah Penduduk Desa Probur pada tahun 2019 mencapai 2,453 jiwa. hampir sebagian besar masyarakat di Desa Probur memiliki tingkat ekonomi yang rendah dan dikategorikan sebagai masyarakat kurang mampu atau miskin. hasil penelitian di Desa Probur, bahwa jumlah anak yang tidak bersekolah mencapai 20 sampe 30 anak, ini terhitung dari angka putus sekolah dan angka buta huruf, pada hal di desa probur terdapat 1 SD, 1 SMP Negeri, dan 1 SMA Negeri. Salah satu penyebabnya terjadi anak putus sekolah yakni tingginya biaya pendidikan dan kurangnya perhatian yang khusus dari instansi terkait. besaran dana PIP diberikan per peserta didik dengan rincian sebagai berikut:

Jejang Pendidikan	Besar Dana
SD/Paket A	Rp450,000,00
SMP/Paket B	Rp750,000,00
SMA/Paket C	Rp1.000,000,00
SMK/ Kursus dan Pelatihan	Rp1.000,000,00

Angka ini diharapkan para siswa dapat menggunakannya dengan baik dalam menunjang kebutuhan pendidikan. Oleh karena itu penulis ingin melakukan dan mengkaji efektivitas Program Indonesia Pintar di Desa Probur, Kecamatan Alor Barat Daya , Kab. Alor ini dengan tujuannya memberikan akses pendidikan pada anak usia 6 sampai 21 tahun. Mengacu pada uraian tersebut diatas maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektifitas Program Indonesia Pintar di Desa Probur Kec. Alor Barat Daya Kab. Alor”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan judul yang penulis ajukan serta latar belakang yang tertera, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas Program Indonesia Pintar di Desa Probur, Kecamatan Abad, Kabupaten Alor ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas program Indonesia Pintar di Desa Probur, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor ?

1.3 Tujuan Dan Manfaat

1. Tujuan Teoritis
 - a. Untuk mendeskripsikan pemanfaatan dana Program Indonesia Pintar di Desa Probur, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor.
 - b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas program.
2. Manfaat praktis
 - a. Untuk mengetahui faktor-faktor mempengaruhi efektivitas program .
 - b. Bagi penulis untuk memperoleh pengalaman dan meningkatkan serta menambah pemahaman penulis tentang efektivitas program.